

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemenuhan kehidupan dasar manusia baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam yang berada di daerah tersebut demikian (Galtung dalam Lambang, 2007 : 3). Salah satu kota besar yang melakukan pembangunan besar-besaran pada saat ini adalah kota Tuban. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pabrik besar-besaran yang berdiri di Kabupaten Tuban. Di Kabupaten Tuban sudah berdiri pabrik-pabrik besar diantaranya adalah pabrik semen Petrokimia Gresik, pabrik semen Holcim dan lain-lain.

Kota Tuban mengalami perkembangan pesat dalam industrilisasi selama dua dekade terakhir ini. Potensi di bidang industri terutama pada segi pertambangan, dalam industri tambang membutuhkan strategi perencanaan dan pengembangan yang lebih komprehensif yang memperimbangan beberapa aspek (Witjaksono, 2014). Hal itu dilakukan agar pembangunan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan tentu akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan dampak buruk dalam suatu pembangunan dan pada saat produksi suatu pabrik.

Tuban diindikasikan memiliki sumber minyak baru yang mampu mencukupi kebutuhan bahan bakar masa depan. Untuk memastikan keberadaan titik-titik sumber minyak tersebut, tim Pertamina Hulu Energi Tuban East Java mulai menurunkan pekerja untuk melakukan survei di sejumlah titik tersebut. Titik sumber minyak pada 53 desa yang tersebar di 10 Kecamatan di Tuban berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Tuban Kecamatan tersebut meliputi Merakurak, Montong, Singgahan, Rengel, Soko, Jenu dan sekitarnya. Seismik merupakan studi geologi dengan membuat getaran tanah tujuannya untuk mengetahui keberadaan cekungan minyak, baru dilakukan pengeboran dan

eksplorasi untuk produksi masal. Prakteknya survei yang sudah berjalan dua bulan terakhir tersebut belum sepenuhnya diterima warga karena mereka mengeluhkan ketidak jelasan kompensasi survei yang menempati lahannya dan termasuk kekhawatiran aktivitas pengeboran sumber minyak tersebut dapat merusak lahan dan bangunan warga. (Radar Bojonegoro, 11 Desember 2019, 20:00 WIB).

Dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kota Tuban menggandeng dan bekerjasama dengan pihak PT. Pertamina Resnoft Pengolahan Dan Petrokimia (PRPP). Hal ini dilakukan dan diharapkan oleh pemerintah agar potensi yang ada di Kabupaten Tuban dapat dimanfaatkan dengan semestinya dan diharapkan dapat mengurangi jumlah ekspor bahan bakar minyak dan pengangguran yang berada khususnya di daerah Kabupaten Tuban. Selain itu beberapa media massa juga menyebutkan dan menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembangunan sempat tersebar bahwa timpang siur siur tentang lokasi pembangunan karena beberapa faktor dan perijinan.

Rencana proyek pembangunan kilang minyak *New Grass Root Renefery* (NGRR) pertama kali akan didirikan di Kabupaten Tuban pada tahun 2017 namun rencana tersebut gagal karena pihak Pertamina menemukan sumber daya alam yang lebih baik di Kabupaten Bondowoso. Rencana pembangunan kilang minyak di Kabupaten Bondowoso mengalami kegagalan karena lokasi kilang minyak yang teralalu dekat dengan kawasan militer yang ada di Kabupaten Bondowoso menyebabkan gagalnya rencana pembangunan di kota tersebut dan pada akhirnya kilang minyak tersebut kembali kerencana awal yaitu di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban alasan pemerintah menetapkan lokasi tersebut karena letaknya cukup strategis dengan pabrik-pabrik yang dapat mendukung pengoperasian perusahaan NGRR. Hal ini dibuktikan bahwa daya serap pekerja yang akan dibutuhkan proyek tersebut. Selain itu proyek *New Grass Root Renefery* membutuhkan lahan yang sangat luas.

Pembangunan *New Grass Root Renefery* membutuhkan lahan seluas 800 hektar sedangkan pemerintah Kabupaten Tuban memiliki tanah seluas 400 hektar

dan rencananya akan melakukan reklamasi yang awalnya 150 hektar menjadi 200 hektar jika terjadi seperti itu maka perusahaan akan membeli lahan sebanyak 200 hektar dari warga desa Wadung, Rawasan dan Sumurgeneng. Pembangunan ini akan menyedot 5000 tenaga *outsourcing* seperti rincian sebagai berikut sekitar 2500 orang dari Pertamina dan 5000 tenaga *outsourcing*. Dalam tahap pembangunan ditahun 2020 membutuhkan 7000-8500 tenaga kerja, pada tahun 2023 membutuhkan tenaga kerja sekitar 30.000-45.000 tenaga, sedangkan pada tahun 2025 membutuhkan jumlah Tenaga Kerja 2500-5000 pekerja (Blok Bojonegoro, 12 Desember 2019, 21.00 WIB).

PT. Pertamina Resnft Pengolahan dan Petrokimia adalah salah satu perusahaan patungan dari perusahaan Pertamina dan perusahaan Resnft dimana proyek tersebut memiliki nilai pembagian hasil 55 % untuk perusahaan Pertamina dan 45% untuk perusahaan Resnof. Selain itu beberapa Adapun perkiraan produk BBM yang nanti akan dihasilkan *New Grass Root Renefery* Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, solar 99 ribu barel per hari dan *Avtur* 26 ribu barel per hari, sedangkan untuk produk baru petrokimia adalah *polipropietilen* 1,3 juta per tahun, *polietilen* 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun. Dalam prakteknya proyek *New Grass Root Renefery* membutuhkan banyak lahan yang luas.

Dalam situs resmi (kppip.go.id pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB) disebutkan nilai investasi Kilang Minyak Tuban sebesar Rp.199,3 triliun, sedangkan penanggung jawab proyek pengolahan minyak tersebut adalah Pertamina. Rencana mulai kontruksi dilakukan pada 2020, sedangkan rencana operasi diperkirakan pada tahun 2024 didalam (Suara Banyuurip, 2018 : 1). Proyek pembangunan ini sering disebut dengan nama *New Grass Root Refienery* (NGRR). Setelah menemukan tempat yang pas untuk melakukan pembangunan pihak perusahaan melakukan lahkah selanjutnya yaitu langkah perijinan.

PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina *Internasional* (KPI) dan perusahaan migas Rusia *Resnft Oil Company* melalui afiliasinya *Petrol Complex PTE LTD* menandatangani akta pendirian perusahaan patungan, perusahaan ini akan membangun dan mengoperasikan kilang di

Tuban. Penandatanganan akta berlangsung di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ruang layanan perijinan inventasi 3 jam (II3J), gedung Ismail Saleh dengan memanfaatkan layanan prioritas yang dilakukan oleh tim Layanan II3J- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM Jakarta.

Direktur KPI, Acmad Fathoni Mahmud menjelaskan dalam rangka pembangunan NGRR Tuban yang direncanakan berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan total nilai inventasi kurang lebih USD 15 Miliar, dimana komposisi saham perusahaan sebesar 55% untuk Pertamina dan 45% untuk *Rosneft*. Adapun perkiraan produk BBM yang nanti akan dihasilkan NGRR Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, solar 99 ribu barel per hari dan *Avtur* 26 ribu barel per hari, sedangkan untuk produk baru petrokimia adalah *polipropietilen* 1,3 juta per tahun, *polietilen* 0,65 juta ton per tahun, *stirena* 0,5 juta ton per tahun dan *paraksilen* 1,3 juta ton per tahun.

Deputi Bidang Pelayanan Modal Lestari Indah menjelaskan bahwa BKPM sangat mendukung pendirian badan hukum Indonesia atas nama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT.PRPP) antara Pertamina dan Rosneft. Implementasi proyek pembangunan Strategis Nasional diharapkan dapat menyeimbangkan demand supply pasokan migas sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 20.00 WIB)

PT Pertamina bersama Mitranya *Oil Rosneft Company* sedang menyelesaikan studi analisis dampak lingkungan untuk pembangunan dan pengoperasian kilang terpadu minyak dan petrokimia di Tuban. Dalam penyusunan Amdal tersebut NGRR meminta masukan dari masyarakat. Direktur Megaprojek Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, pihaknya telah melakukan *kick off* atau pelaksanaan awal studi Amdal dan *Environment and Social Impact Analysis* pada tanggal 14 desember 2016.

Sosialisasi adalah salah satu cara pendekatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka mengenalkan suatu produk kepada penduduk. Sosialisasi pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Januari 2014 yang dipimpin

oleh Amir H. Sinagan selaku perwakilan dari perusahaan NGRR, di dalam rapat tersebut Amir mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan sosialisasi kepada warganya, selain memberikan sosialisasi Amir mengajak para tokoh masyarakat untuk memberikan masukan kepada perusahaan agar terhindar dari konflik dengan warga sekitar. Untuk menghindari berbagai masalah yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan perusahaan maka mereka membuat suatu lembaga desa yang memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat.

Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan tujuannya untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra pemerintah desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemerdayaan masyarakat di bidang pembangunan. Imam Makruf sebagai anggota LPMD Desa Wadung mengungkapkan, keberadaan pembuatan kilang minyak ini perlu adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat yang berada di wilayah sekitar, selain itu masa peralihan pekerjaan ini harus dipikirkan oleh semua elemen hal ini disebabkan banyak warga desa mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, masukan yang ketiga yaitu perusahaan harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, jangan sampai terciptanya kesenjangan dan berakhir dengan konflik. Sementara itu perwakilan dari kilang minyak Amir H. Sinagan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan kepada pihaknya (Rochim, 2014 : 1). Dalam hal ini pemerintah menyetujui proyek tersebut karena beberapa alasan.

Pemerintah kota menyetujui pembangunan ini karena dianggap banyak lahan yang tidak terpakai di kabupaten Tuban, selain itu pembangunan ini dianggap banyak membawa dampak positive dibandingkan dengan dampak negativenya, dan diharapkan dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Tuban. Pemerintah dan Pt. Pertamina menjajikan akan membeli lahan warga yang terkena pembangunan akan dibeli dengan harga yang tinggi selain itu warga desa yang terkena imbas pembangunan dijanjikan akan diperkerjakan baik saat pembangunan ataupun saat pengoperasian pabrik tersebut (Candra, 2007 : 1).

Dalam melakukan pembangunan tentulah tidak selalu berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat termasuk dalam pembangunan proyek pembangunan *New Grass Root Renefer*.

Konflik adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan sehari-hari dari manusia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Manusia tidak akan bisa berkembang apabila tidak ada konflik. Kehidupan seseorang akan cenderung stagnan apabila tidak terjadi konflik. Menurut James Scott Resistensi terjadi karena dominasi kaum kelas atas terhadap kelas bawah selain itu dominasi yang selalu sewenang-wenang dapat menimbulkan terjadi suatu perlawanan, selain itu James Scott juga menjelaskan bahwa konflik ada karena adanya lapisan struktur masyarakat dari kelas bawah ke atas (Lucky, 2014 : 4) selain itu konflik dibagi menjadi dua yaitu konflik terbuka dan tertutup. Resistensi terbuka yaitu resistensi yang dilakukan secara bersama dan terbuka contohnya yaitu demo dan banyak lagi, sedangkan resistensi tertutup yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan secara rutin dan tanpa terkoordinasi contohnya yaitu dengan cara melakukan penjarahan di malam hari dan lain-lain. Konflik memiliki dua mata pisau yaitu sisi negatif dan sisi positif, negatif apabila konflik itu merugikan kedua pihak dan tidak dapat dimengerti dengan baik oleh seseorang dan akan sebaliknya apabila kita dapat mengelola konflik. Beberapa alasan warga Desa Wadung Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban menurut beberapa media massa.

Beberapa desa yang ada di Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban melakukan demo besar-besaran di depan kantor DPRD Tuban. Enam desa yang mengikuti unjuk rasa yaitu warga Desa Wadung, Desa Sumurgeneng, Desa Rawasan, Desa Kaliuntu, Desa Remen dan Desa Mentosa melakukan tersebut menuntut penolakan kilang minyak yang akan berdiri di beberapa di desa setempat. Unjuk rasa ini dilakukan di depan kantor DPRD Tuban, di dalam ditengah unjuk rasa mereka berorasi bahwa “ Pembebasan lahan kilang minyak hanya untuk kepentingan perusahaan bukan untuk rakyat”. Menurut Orator warga desa meminta penetapan lokasi kilang minyak ditolak karena dinilai melanggar hukum, sebab masyarakat tidak ada kewajiban untuk menjual tanahnya ke Pertamina ataupun *Rosneft* (Sudarsono, 2019 : 1). Beberapa upaya yang akan ditempuh oleh pihak

Pertamina dan *Resnoft* untuk mendapatkan lahan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Dari beberapa diskripsi diatas peneliti menemukan suatu permasalahan baru yaitu bentuk-bentuk pengespresian atas resistensi antara warga desa dengan pihak perusahaan sehingga memunculkan permasalahan yang baru. Alasan pertama peneliti mengangkat tema ini yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh warga Desa Wadung dan sekitarnya termasuk unik selain itu pergerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga desa Wadung akan menarik dan susah ditebak, karena pada saat bulan awal Januari 2019 cenderung terbuka dan frontal namun berbeda lagi pada bulan pertengahan bulan Juni mulai menghilang spanduk spanduk yang ada dipemukiman warga hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti. Sedangkan kalau kita berbicara manfaat pembangunan ini tentulah keuntungan ini tidak hanya akan dirasakan oleh warga Tuban namun juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat diluar Kabupaten Tuban. Maka dari itulah peneliti mengangkat permasalahan Bagaimanakah Resistensi Warga Desa Wadung dan sekitarnya terhadap proyek pembangunan kilang minyak *New Grass Root Refienery* di Kabupaten Tuban?

Peneliti memilih Desa Wadung sebagai obyek penelitian karena diharapkan mendapat data yang lebih mendalam dan lebih fokus pada satu permasalahan, selain itu pada saat observasi pertama terdapat beberapa spanduk besar yang ada di pemukiman warga sampai saat ini dan yang menjadi lebih menarik lagi pada akhir-akhir ini spanduk tentang resistensi tersebut mulai menghilang namun pada beberapa saat warga desa Wadung dan lainnya masih melakukan penolakan selain itu Desa Wadung juga adalah salah satu desa yang memiliki lokasi yang paling strategis dibandingkan Desa Remen dan sekitarnya untuk menunjukkan ekspresi penolakan dari beberapa desa yang lain. Maka dari itulah peneliti mengangkat judul **Resistensi Petani Desa Wadung Terhadap Proyek Pembangunan *New Grass Root Refienery* Di Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban**

1.2 Rumusan masalah

Bagaiamanakah bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh Warga Desa Wadung Terhadap Pembangunan Kilang Minyak *New Grass Root Renienery* di Desa Wadung kecamatan Jenu kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui alasan warga Desa Wadung menolak pembangunan di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
- 1.3.2 Untuk mengetahui gambaran bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh warga Desa Wadung terhadap pihak Kilang Minyak NGRR
- 1.3.3 Untuk mengetahui situasi saat ini di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Teoritis

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Sosiologi.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penulis berikutnya, yang akan melakukan sudi lanjut yang berkaitan dengan Sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau informasi bagi pihak-pihak yang berkeprntingan.

1.4.2.2 Menjadi acuan dan pertimbangan bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya.